

HONOUR-KILLING A General Overview

Juanita Wiratmaja

Lebih dari 5000 wanita menemui ajal akibat praktek honour killing di seluruh dunia setiap tahunnya. Di Pakistan sendiri dilaporkan terdapat 1256 kasus honour killing tahun 2003 lalu. Kasus ini merupakan fenomena gunung es, diperkirakan angka yang sebenarnya akan jauh lebih besar dari itu.

Pada 6 Januari 1999, Ghazala dibakar hingga tewas di Joharabad, Punjab. Keluarganya melakukan itu setelah mendapat laporan dari saudara laki-laki Ghazala yang mencurigainya punya hubungan gelap dengan seorang tetangga. Tubuhnya yang terbakar dan telanjang tergeletak begitu saja di jalan selama 2 jam karena tak ada yang mau mengurusnya. Ghazala telah menjadi korban dari praktek *honour killing* yang masih berlangsung hingga kini dan telah banyak merenggut nyawa wanita di berbagai belahan dunia.¹

Honour Killing didefinisikan sebagai berikut:

"An honour killing is a murder of a woman accused of or actually involved with a man in act like infidelity, flirting or other instances perceived as, or one whose behavior is perceived as immoral. This happens when one or more male relatives suspect or note that the woman is a blot on the face of the family for her perceived illegal sexual activity."

(Nasir Ali, [http://](http://www.chowk.com/show_writer_page.cgi)

www.chowk.com/show_writer_page.cgi)

Honour Killing merupakan praktek kekerasan berbasis gender, di mana perempuan-perempuan dihabisi nyawanya karena dianggap telah mencoreng kehormatan dan memberi malu pada keluarga. Eksekutornya adalah laki-laki anggota keluarga, bisa si ayah, suami, paman, sepupu, kakak atau adik laki-laki korban. Kasus-kasus *honour killing* dilaporkan terjadi tidak hanya di Timur, seperti di Turki, Amman, Jordania, Irak, Palestina, Pakistan, Israel, Afganistan, Irak, India, Mesir, Bangladesh atau Amerika Latin. Tetapi ini juga terjadi di Barat, seperti di Swedia, Inggris, Perancis, Italia, negara-negara di mana terdapat komunitas imigran Timur Tengah. Sayangnya tidak semua negara melaporkan kasus ini ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB, termasuk Indonesia.²

Dalam sistem sosial dengan budaya patriarki yang radikal, perempuan dianggap sebagai milik lelaki dan merupakan perwujudan

kehormatan mereka. Pepatah Arab yang terkenal mengatakan: "aib tidak bisa dibersihkan kecuali dengan darah." (El Saadawi, Nawal, Wajah Telanjang Perempuan. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003. hal 148). Begitu juga halnya dengan perempuan yang telah kehilangan kesucian atau berzina, mereka dianggap memberi malu yang luar biasa pada keluarga hingga pantas dibunuh agar kehormatan keluarga pulih kembali. Tak ada kesempatan bagi si perempuan untuk bisa melindungi diri apalagi membela hak-haknya.

Dalam realitanya, honour killing bahkan bisa lebih buruk lagi. Banyak perempuan jadi korban karena kecurigaan atau tuduhan yang belum tentu benar. Praktek ini juga dilakukan terhadap wanita yang menceraikan suaminya, menolak perjodohan, berhubungan dengan pria yang berbeda agama atau dianggap telah terpengaruh budaya Barat.

Di Turki tahun 1995, seorang gadis cantik berusia 17 tahun dibunuh oleh sepupu laki-laknya yang berusia 15 tahun. Ketika itu si gadis merasa bosan, jadi ia mulai mendengarkan radio dan pergi ke kafe. Tak disangka hal itu berujung pada kematiannya. Keluarganya memutuskan bahwa dia harus dibunuh, karena dia dianggap telah begitu terpengaruh kultur Barat. Hasil otopsi menyatakan bahwa ia ternyata masih perawan.³ Otopsi bagi keluarga korban penting, bukan untuk apa-apa, mereka hanya ingin

membuktikan apakah korban masih perawan atau tidak. Seperti yang terjadi pada Dalia, ketika hasil otopsi menunjukkan bahwa ia masih perawan, si abang yang ikut andil dalam kematiannya langsung dirundung penyesalan. Dalia, gadis muslim Jordania, tewas setelah ditusuk 12 kali di dada oleh ayahnya sendiri. Ia dibunuh karena dilaporkan abangnya mempunyai hubungan dengan pria Katolik.⁴

Menolak perjodohan yang telah diatur oleh keluarga juga dianggap sangat mencoreng muka keluarga sehingga bisa berujung pada kematian si gadis. Di tahun 2002, Fadime Sahindal, warga Swedia keturunan Kurdi, ditembak di kepala oleh ayahnya sendiri ketika dia mengunjungi saudaranya di Uppsala.⁵ Fadime dianggap memalukan keluarga karena menolak perjodohan dan memilih pasangannya sendiri. Sebelumnya di tahun 1998, Fadime juga dianggap telah mempermalukan keluarga dengan mempublikasikan pengadilan atas ayah dan saudara laki-laknya yang mengancam untuk membunuhnya. Kini misi keluarganya untuk memulihkan kehormatan keluarga telah tuntas.

Namun, yang paling menyakitkan dari semuanya adalah ketika gadis yang menjadi korban perkosaan dibunuh karena telah kehilangan kesuciannya dan menodai keluarga. Emine Kizilkurt, 14 tahun, dijerat dengan selendang oleh kakak laki-laknya hingga tewas setelah pertemuan anggota keluarga

laki-laki memutuskan untuk membunuhnya. Emine dibunuh karena hamil akibat perkosaan yang dialaminya.⁶

Kejahatan ini telah berlangsung lama dan terus diwariskan hingga sekarang. Tradisi kekerasan ini terus berlanjut sebab ia menemukan pijakan yang cukup kuat yaitu agama dan budaya. Kekerasan ini dilanggengkan dengan argumen bahwa *honour killing* mempunyai landasan agama yang bersumber dari teks suci dan telah menjadi bagian dari budaya suku bangsa mereka (Arab, Kurdish, dlsb)

Antropologis GM. Kessler menggambarkan budaya Arab sebagai "*honour and shame culture*". Di mana masyarakat amat menjunjung prestis dan mempunyai kebutuhan yang hebat untuk menjaga kehormatannya. Ini kemudian dianggap sebagai faktor yang berkontribusi mendorong terjadinya praktek bom bunuh diri, dan juga *honour killing* ini.

Namun, pandangan bercorak relativisme budaya seperti ini dapat terus melanggengkan praktek *honour killing* karena kekerasan itu secara tidak langsung telah dapat diterima sebagai bagian dari pelaksanaan kultur bangsa tertentu. Mark Malloch Brown, administrator *United Nations Development Programme*, mengingatkan bahwa kita jangan sampai terjebak pada pemikiran semacam itu. Sebab kekerasan berbasis gender tak pernah menjadi

bagian integral budaya manapun.

Pranata-pranata sosial yang ada dianggap cukup punya andil dalam melanggengkan kekerasan ini, seperti sekolah dan keluarga. Selain itu faktor lain yang berpengaruh adalah agama dan institusi negara. Budaya patriarki yang radikal ini juga tercermin dalam banyak karya sastra yang dihasilkan di negara-negara Arab.

Negara idealnya adalah institusi yang memberi perlindungan kepada warga negaranya tanpa pengecualian. Namun, beberapa negara ternyata menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Permasalahan krusial seperti *honour killing* tidak ditindak lanjuti secara serius.

Pertama, banyak negara kurang tegas dalam menindak pelaku *honour killing*, hukum yang digunakan untuk mengadili terkesan sangat lunak. Tak jarang pelaku kejahatan ini hanya dihukum 1 atau 2 tahun penjara. Oleh karena itulah, biasanya amanat untuk mencabut nyawa korban diserahkan kepada laki-laki anggota keluarga yang masih belia, sehingga hukuman yang akan dikenakan pun menjadi lebih ringan. Bahkan di negara seperti Pakistan, Penal Code menyatakan pelaku pembunuhan bukan dianggap pembunuh jika ia melakukannya karena kehilangan kontrol diri akibat kemarahan dan provokasi yang mengejutkan. Pasal ini banyak digunakan sebagai pembelaan dalam kasus pengadilan

honour killing. Juga ada keringan hukuman bila tindakan kriminal ini dilakukan atas keturunannya langsung (anaknya). Selain itu pembuktian yang berbelit pada kasus perkosaan telah membuat wanita dipojokkan. Bisa saja wanita yang melapor diperkosa malah akan dikenakan tuduhan zina jika tidak berhasil membawa saksi mata empat pria dewasa. Negara yang terus mempertahankan hukum yang tidak adil bagi perempuan ini akan terus aktif melanggar praktek kekerasan terhadap perempuan.

Sistem peradilan di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Maroko, Yordania menggunakan peraturan atau hukum adat untuk meringankan atau membebaskan pelaku *honour killing*. Sementara itu di negara Brazil atau Amerika Serikat yang multikultural, banyak kasus pembunuhan istri oleh suami dengan dalih membela kehormatan mendapat keringanan atau dibebaskan. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan *cultural defence*, di mana pelaku memohon pertimbangan latar belakang ras, etnik atau agama untuk memperoleh keringanan atas tindak kriminal tertentu.

Kedua, negara tidak memberi perlindungan kepada perempuan yang menjadi sasaran kekerasan ini. Negara-negara ini sepertinya enggan untuk melakukan intervensi dalam masalah ketidakadilan terhadap perempuan seperti *honour killing*. Bahkan

negara terkesan membiarkan kekerasan seperti itu berlanjut dalam justifikasi atas nama tradisi. (Thomas, D. Q. and Levi, R. S., 'Violence Against Women: An Introduction' in Askin, K. D. and Koenig D. M, (eds.), *Women and International Human Rights Law*. New York: Transnational Publishers, 1997)

Dalam banyak kasus, perempuan yang melarikan diri dari petaka *honour killing* dan meminta bantuan pada aparat keamanan malah diserahkan kepada keluarga ingin membunuhnya. Sering terjadi juga laporan korban perkosaan tidak diteruskan ke jalur hukum tetapi penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga korban. Hal ini berbahaya sebab kondisi sosio-kultur di sana menginginkan perempuan yang diperkosa menutup rapat mulutnya. Kehilangan keperawanan dianggap merupakan suatu aib dan melaporkan hal itu ke polisi disamakan dengan membongkar aib keluarga. Sehingga bukan mustahil korban perkosaan malah akan dihabisi oleh keluarganya sendiri.

Ketiga, beberapa negara di mana banyak terdapat kasus *honour killing* umumnya tidak ikut meratifikasi *United Nations on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), contohnya 2 negara tempat mayoritas suku Kurdi bermukim yaitu Iran dan Irak, di mana *honour killing* banyak dilakukan. Ada juga beberapa negara yang tidak melaporkan kasus

ini ke Amnesty International maupun ke Komisi HAM PBB. Nampaknya, tekanan internasional terhadap negara ini dibutuhkan untuk mendesak pemerintah agar menangani kasus ini secara lebih serius. Sebab kejahatan terhadap kemanusiaan ini bukan hanya permasalahan domestik negara itu tetapi juga bersifat universal.

Di sisi lain, adalah tidak mudah untuk mengubah hukum yang telah ada di negara-negara tersebut. Keberatan dan penolakan akan datang dari kaum konservatif di parlemen yang ingin mempertahankan dominasi laki-laki dalam negara. Kaum konservatif ini beranggapan bahwa mereka yang mengusulkan bentuk hukum baru yang lebih menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan gender telah menjadi korban westernisasi atau tunduk pada intervensi asing.

Memang selama ini wacana hak asasi manusia banyak didominasi oleh pendekatan "barat". Perlu dilakukan dialog atau pendekatan baru agar nilai dan standar hak asasi manusia itu dapat diterima masyarakat lokal sehingga secara bertahap bisa mengubah hukum adat dan perilaku opresif terhadap wanita dan menyelaraskan penghormatan HAM sesuai dengan hukum internasional. (An-Na'im, dalam *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, 1993)

Interpretasi atas teks suci yang dikuasai oleh simbol-simbol maskulin yang kuat ikut

menyumbang terus berlangsungnya ketidakadilan terhadap wanita. (Jurnal Perempuan, Edisi 20, 2001). Seperti halnya dalam kasus *honour killing* ini, teks suci yang diambil dan ditafsirkan sepotong-sepotong digunakan untuk menjustifikasi perlakuan kekerasan terhadap perempuan. Umumnya penafsiran yang bias gender disebabkan oleh pikiran-pikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya patriarki yang kemudian dianggap sebagai agama. (Maria Ulfah Ansor, 2001).

Keluarga yang menjadi wadah interaksi utama seorang individu juga telah melestarikan budaya patriarki yang kuat. Tak jarang, aksi pembunuhan terhadap anak perempuan bahkan didukung oleh si ibu. Ini mencerminkan kuatnya internalisasi nilai-nilai yang patriarki terhadap perempuan, sehingga cara berpikir dan bertindak pun telah terkondisikan seperti itu. Pelestarian kultur ini diwujudkan dalam cara membesarkan, mendidik dan memperlakukan anak-anak dalam keluarga.

Youssef dalam 'Cultural Ideals, Feminine Behaviour and Family Control', *Comparative Studies in Society and History*, mengatakan bahwa keluarga sebagai sumber utama pembentukan identitas mengontrol perilaku individu melalui nilai sosial "kehormatan". Kehormatan keluarga dikaitkan dengan karakteristik kejantanan untuk laki-

laki dan kesucian untuk perempuan. Dalam sistem sosial telah terkonstruksi bahwa kehormatan laki-laki terletak pada kesucian perempuannya, sehingga mengikat perempuan dalam peran tradisional dalam perkawinan dan struktur masyarakat.

Dalam konteks pembicaraan *honour killing*, konsep kehormatan keluarga juga didefinisikan sebagai kode perilaku sosial yang diterapkan pada perempuan untuk mempertahankan supremasi laki-laki. Konsep ini kemudian dibingkai dalam budaya dan tradisi Arab untuk mengendalikan masyarakat. *Honour killing* juga ditanamkan sebagai "perlakuan khusus" yang wajar dalam budaya mereka. (Al-Fanar, 'Developments in the Struggle against the Murder of Women against the Background of so-called Family Honour', *Women Against Fundamentalism Journal*, no.6, 1995)⁷

Masyarakat di mana keluarga-keluarga tersebut tinggal amat berpengaruh, sehingga otomatis ikut bertanggung jawab akan terus berlangsungnya "tradisi" *honour killing*. Nilai-nilai kehormatan keluarga terus-menerus dihidupkan dalam lingkungan ini. Di mana mekanisme kontrol sosial dan sanksi sosial akan diterapkan pada keluarga yang anak gadisnya dianggap mempermalukan keluarga. Orang-orang di komunitas itu menganggap anggota keluarga yang melakukan eksekusi *honour killing* sebagai pahlawan yang

menyelamatkan muka keluarga.⁸ Laki-laki yang keluar dari penjara akibat melakukan "misi suci" itu akan disambut dengan sorak-sorai serta puja-puji. Cara mereka memperlakukan pelaku kejahatan sebagai tokoh kebanggaan ini akan terus menghidupkan tradisi berdarah ini.

Data menyebutkan bahwa fenomena *honour killing* lebih banyak ditemukan pada keluarga yang relatif miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun demikian pendidikan yang tinggi tidak menjamin adanya perubahan cara pandang mengenai perempuan, sehingga *honour killing* bisa terhapuskan. Sistem dan kurikulum yang ada belum menumbuhkan sikap kritis dan mengubah cara pandang masyarakat. Selain itu, pembatasan-pembatasan terhadap perempuan juga telah menghambat mereka untuk mengakses pendidikan.

Upaya LSM perempuan lokal maupun internasional perlu mendapat dukungan dari perempuan dan masyarakat setempat. Sebab *honour killing* disebabkan oleh akar patriarki yang kuat yang mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakatnya. Sehingga diperlukan dukungan aktif dari perempuan sendiri sebagai korban yang dilukai. Perubahan ini mungkin membutuhkan waktu yang lama dan perjuangan yang tanpa henti sebab praktek ketidakadilan ini pun telah berlangsung hampir sepanjang

sejarah manusia. Dengan semakin meng-globalnya dunia, isu-isu seperti *honour killing* pasti akan mendapat banyak sorotan dan perhatian internasional. Hal ini merupakan sesuatu yang positif untuk memberitakan pada dunia bahwa telah terjadi ketidakadilan di sana dan mungkin mereka yang peduli akan melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu. Beberapa wanita berhasil lolos dari cengkeraman budaya patriarki radikal ini dan tinggal di luar negeri. Mereka bisa membangun jaringan atau dukungan dari berbagai pihak untuk menolong perempuan-perempuan senasib di negaranya.

Footnotes :

¹ Lihat <http://www.amnesty.org/library/index/engasa330201999>

² Tempo, 28 Maret 2004: " Hilang Nyawa karena Nila"

³ Lihat <http://www.thestar.com/nasapp/cs/contentserver?pagename=thestar/render&c=page&cid=99245733237>

⁴ Lihat <http://www.abc.net.au/religion/default.htm>

⁵ Lihat http://www.geocities.com/paris/tower/4452/amir_hassanpou.htm

⁶ Lihat <http://www.amnestyusa.org/countries/pakistan>

⁷ Tulisan Al-Fanar berkonteks pada praktek *honour killing* di masyarakat Palestina.

⁸ Al-Khayat, *Women in Modern Iraq*, 1993.